

PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN LAWANG WETAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Maulan Irwadi¹⁾, Kemas Welly Angga Permana²⁾

¹⁻²Program Studi Akuntansi Universitas Sjakhyakirti

Email: irwadi1@yahoo.co.id¹

Email: kemaswelly@unisti.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran umum apakah tanggung jawab pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh kompetensi perangkat desa. Regresi dan uji t adalah dua prosedur analisis yang dipakai dalam metodologi kuantitatif asosiatif penelitian ini. Dengan menyebarkan kuesioner ke 15 desa di kecamatan Lawang Wetan, maka diambil sampel yaitu 61 responden dengan sampel jenuh. Hasil 0,001 didapatkan dari hasil pengujian dengan pengujian uji t pada taraf signifikan 0,05, dan temuan menunjukkan bahwa t hitung melebihi t tabel (3,396 lebih dari 1,671). Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat diterima berdasarkan temuan tersebut. Persamaan menghasilkan $Y = 33,683 + 0,640X$ sesuai temuan uji regresi linier sederhana. Pada objek penelitian Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, hal ini menunjukkan bahwa koefisien regresi kompetensi aparatur desa bertanda positif, menunjukkan adanya hubungan positif antara kompetensi aparatur desa dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa di Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin variabel kompetensi perangkat desa dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: kompetensi aparat desa, akuntabilitas, keuangan desa

Abstract

This study intends to provide an overview of whether the responsibility for managing village finances in Lawang Wetan District, Musi Banyuasin Regency is influenced by the competence of village officials. Regression and t test are two analytical procedures used in the associative quantitative methodology of this research. By distributing questionnaires to 15 villages in the Lawang Wetan sub-district, 61 respondents were taken as a sample in this study using a saturated sampling strategy. 0.001 was found based on the test results using the t test tool at a significant level of 0.05, and the findings showed that t count exceeded t table (3.396 more than 1.671). The research hypothesis which states that the competence of village officials has a positive and significant effect on the accountability of village financial management can be accepted based on these findings. The equation produces $Y = 33.683 + 0.640X$ according to the findings of the simple linear regression test. In the research object of Lawang Wetan District, Musi Banyuasin Regency, this shows that the regression coefficient of village apparatus competence is positive, indicating a positive relationship between village apparatus competence and village financial management accountability. Based on the test results, it is known that in Lawang Wetan District, Musi Banyuasin Regency, the competency variable of village officials can increase accountability in village financial management..

Keywords: competence of village apparatus, accountability, village finance.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang meliputi antara lain pembangunan wilayah, pembangunan

perkotaan, dan pembangunan desa, merupakan proses perubahan yang dilakukan dan direncanakan secara efektif. Upaya pemerintah

untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan diantisipasi untuk mencapai keseimbangan antara laju pertumbuhan wilayah, pembangunan perkotaan, dan pembangunan desa. Namun demikian, masih terdapat perbedaan pembangunan, baik dalam hal pelaksanaan antara kota dan desa maupun antara daerah dan kota. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di perkotaan mencapai 6,69% pada Maret 2019, namun jauh lebih tinggi di perdesaan, mencapai 12,85%. Salah satu faktor penyebab ketimpangan tersebut adalah ketimpangan yang diakibatkan oleh pembangunan yang tidak merata yaitu tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia yang.

Untuk mengatasi ketimpangan yang ada antara kota dan desa, pemerintah mengambil kebijakan dan memberikan banyak perhatian pada pembangunan desa. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah salah satu bentuk perhatian tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan untuk membentuk pemerintahan desa sendiri. Dalam rangka memaksimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang tertuang dalam peraturan desa (Perdes) tentang APBDes, desa juga diperkuat dengan pemberian beberapa bantuan pemerintah terkait percepatan penyelenggaraan pemerintahan di desa dalam bentuk dana desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, segala tindakan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa berada dalam lingkup pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa diselenggarakan dan dianggarkan berdasarkan konsep akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi. Pengelolaan keuangan desa sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kepala Desa dan PKPKD terbagi mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan Barang Milik Desa. Kepala desa telah memutuskan untuk menggunakan kemampuannya untuk mengawasi keuangan desa, memberikan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa yang berfungsi sebagai PPKD, dan memberikan sebagian kewenangan PKPKD kepada PPKD.

Akuntabilitas merupakan salah satu kualitas atau faktor utama pemerintahan yang efektif, dan kepala desa dengan anggaran desa yang besar berdampak pada bagaimana pemerintahan desa dilaksanakan. Menurut Sujarweni (2015:28), akuntabilitas adalah suatu bentuk tanggung jawab seseorang (pemimpin, pejabat, atau pelaksana) untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.

Peran pemerintah desa sebagai agen yang mengelola keuangan desa menjadi faktor penting terutama untuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan prinsipal atau masyarakat sebagai pertanggungjawaban. Artinya pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan desa menjadi kontrol penuh dari perangkat desa atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam suatu pemerintahan.

Menurut sumber berita online Klikberita.co.id, pada rapat koordinasi evaluasi dan monitoring Kecamatan Lawang Wetan yang dihadiri seluruh kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, UPTD, dan mitra pemerintah meliputi 15 desa-desa di Kecamatan Lawang Wetan, Kepala Bapeda Inspektorat Muba fokus pada hal-hal penggunaan dana desa. Dijelaskannya, dari 247 desa di Kabupaten Muba ada 84 laporan yang masuk ke Inspektorat dalam pengelolaan ADD dan Dana Desa.

Menurut data yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Drs. Abiburahman menetapkan banyak desa, terutama di Kecamatan Lawang Wetan, terlambat dari jadwal karena belum menyelesaikan LKPJ. Desa tersebut adalah Pandan Dulang dan Simpang Sari yang berjumlah 2 (dua). Untungnya, Inspektur menangani pelatihan tersebut. Sampai pihak berwenang diberitahu. Karena kurangnya pengetahuan dan latar belakang pendidikan yang tidak terkait, para pegawai pengelola keuangan desa kesulitan membuat LKPJ, yang pada akhirnya membuat LKPJ tidak dapat diselesaikan tepat waktu (Klikberita.co.id, 10 April 2018).

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang terikat secara teritorial yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah dan mewakili kepentingan lingkungannya sesuai dengan proyek-proyek yang digerakkan oleh masyarakat, serta asal dan atau hak ulayat yang dijunjung tinggi oleh sistem tersebut. pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 23 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesional
- g. Akuntabilitas
- h. Efektifitas dan Efisiensi
- i. Kearifan Lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Pemerintah Desa

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Struktur organisasi Pemerintah Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa pada pasal 2 menyebutkan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa
Perwakilan desa mendukung kepala desa. Sekretariat Desa, Pelaksana Daerah, dan Pelaksana Teknis merupakan Perangkat Desa.

- b. Sekretariat Desa

Sekretaris Desa membawahi Sekretariat Desa dengan dibantu beberapa staf sekretariat. Sekretariat Desa paling sedikit terdiri dari 2 (dua) fungsi yaitu urusan umum dan urusan perencanaan dan keuangan, dan paling banyak 3 (tiga) fungsi yaitu urusan administrasi dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Seorang Kepala Urusan bertanggung jawab atas setiap bisnis.

- c. Pelaksana Daerah

Peran pendamping kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional meliputi jabatan pelaksana wilayah. Seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan paling banyak terdiri dari tiga seksi pelaksana. Seorang Kepala Bagian mengawasi setiap bagian. Sebagai satuan tugas daerah, Pelaksana Daerah merupakan komponen pendukung Kepala Desa. Jumlah komponen pelaksana daerah dihitung sesuai dengan kebutuhan pelaksana daerah, kemampuan keuangan desa, luas wilayah kerja, karakteristik, geografi, kepadatan penduduk, serta prasarana dan sarana penunjang tugas. Pemerintahan desa, pembangunan desa, bina masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa adalah tugas daerah. Dengan memperhatikan keadaan sosial budaya masyarakat setempat, dusun atau sebutan lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota melaksanakan tugas pelaksana wilayah.

- d. Pelaksana Teknis

Kepala Desa menggunakan Pelaksana Teknis sebagai pendamping dalam melaksanakan tugas operasional. Pelaksana Teknis terdiri dari minimal dua bagian—bagian pemerintah serta bagian kesejahteraan dan pelayanan—dan maksimal tiga bagian—bagian pemerintahan, bagian kesejahteraan, dan bagian pelayanan. Seorang Kepala Bagian mengawasi setiap bagian.

Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan disalurkan ke desa melalui APBD Kabupaten/Kota. Mereka digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Wijaya) (2018: 62). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Desa merupakan dana yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat desanya.

Tujuan Dana Desa

Menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Tujuan dana desa adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan publik di desa lebih baik
2. Kemiskinan dapat diatasi
3. Kemajuan perekonomian desa
4. Untuk mengatasi kesenjangan pembangunan yang terjadi antar desa
5. Untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Kompetensi Staf Akuntansi

“Kompetensi adalah sifat dan kemampuan kerja yang meliputi ciri-ciri pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tugas dan atau fungsi jabatannya,” demikian Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 7 tahun 2013.

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 “Kemampuan bekerja secara mandiri bagi setiap orang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Apapun bentuknya, setiap organisasi mencita-citakan pencapaian tujuannya secara efektif dan efisien.”

Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2013 Efektifitas dan efisiensi kerja Aparat Desa dapat dicapai dengan meningkatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan staf

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki dan digunakan oleh seorang staf atau pegawai untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Pengetahuan dan informasi karyawan dapat diterapkan di tempat kerja dalam keadaan yang realistis, yang menunjukkan hal ini. Pengetahuan karyawan mempengaruhi apakah kegiatan yang ditugaskan kepadanya berhasil atau tidak berhasil; karyawan dengan pengetahuan yang sesuai meningkatkan efisiensi lembaga.

2. Keterampilan staf

Keterampilan adalah upaya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh perusahaan kepada seorang

karyawan dengan baik dan semaksimal mungkin. Contoh keterampilan kooperatif adalah kemampuan untuk memahami dan menginspirasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Bagi pekerja yang telah memegang pekerjaan tertentu, bakat ini sangat penting karena berkaitan dengan komunikasi, inspirasi, dan pendelegasian. Selain kemampuan karyawan, sikap perilaku dan pengetahuan karyawan perlu diperhitungkan.

3. Sikap staf terhadap tugas-tugasnya

Sikap kerja (attitude) didefinisikan sebagai pola tingkah laku karyawan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebijakan bisnis. Hal ini penting karena jika seorang karyawan memiliki disposisi untuk bekerja demi kesuksesan perusahaan, maka semua tugas yang diberikan kepadanya akan diselesaikan seefektif mungkin.

Laporan Keuangan

Penciptaan akuntabilitas sektor publik sebagian besar bergantung pada pelaporan keuangan entitas sektor publik. Data keuangan dari sektor publik menjadi landasan pengambilan keputusan Siregar (2015: 79). Tujuan utama akuntansi sektor publik bukanlah untuk memberikan akuntabilitas publik yang efektif; sebaliknya, informasi laporan keuangan adalah alat untuk melakukannya.

Menurut Siregar (2015:79), tujuan umum akuntansi dan pelaporan keuangan untuk instansi pemerintah meliputi:

1. membantu dalam memberikan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta bukti tanggung jawab dan kepengurusan
2. Menyediakan data terkait yang dapat digunakan untuk menilai dan menganalisis ekonomi
3. bagaimana kinerja manajerial dan organisasi diekspresikan (*manajerial dan kontrol*).

Apa itu Akuntabilitas?

Menurut definisi akuntabilitas, mereka yang memberikan pelayanan publik dituntut untuk dapat menjelaskan dan menanggapi setiap pertanyaan tentang prosedur yang diikuti dalam semua pilihan dan proses, serta bertanggung jawab atas hasil pekerjaan mereka (Kusumastuti, 2014).).

Sujarweni (2015: 28) memberikan definisi akuntabilitas sebagai berikut: “kewajiban yang dibebankan kepada seorang pemimpin, pejabat,

atau eksekutif untuk memastikan bahwa tanggung jawabnya telah dipenuhi sesuai dengan undang-undang. Laporan tertulis yang jelas dan informatif dapat menunjukkan akuntabilitas.

Pengelolaan Keuangan di Desa

Pengelolaan keuangan desa, khususnya Pengelolaan Keuangan Desa, merupakan kegiatan menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola sesuai dengan prinsip terbuka, akuntabel, dan partisipatif serta dilaksanakan secara sistematis dan cara sistematis.

3. METODE PENELITIAN

Objek studi

Objek penelitian harus relevan dengan penelitian karena menganalisis kompetensi perangkat desa. 15 desa di Kecamatan Lawang

Wetan Kabupaten Musi Banyuasin dipilih sebagai subyek penelitian.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penyelidikan ini. Untuk mengumpulkan data penelitian, data primer dikumpulkan melalui penyelidikan lapangan dengan menggunakan kuesioner, dokumentasi, dan wawancara. Melalui studi literatur, seperti penggunaan literatur, aturan, dan publikasi pendukung lainnya, diperoleh data sekunder.

Populasi dan Sampel

Di 15 desa di Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin terhitung 65 perangkat desa yang terdiri dari 1 kepala desa, 1 sekretaris desa, 1 bendahara desa, dan 1 perangkat desa (ada lima desa dengan 2 operator).

Semua populasi diambil sampelnya dengan menggunakan metode sampling jenuh. Satu kepala desa, satu sekretaris desa, satu bendahara desa, dan satu operator desa adalah diantara 65 perangkat desa yang terwakili dalam sampel 15 desa di Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin (ada lima desa dengan dua operator).

Dari 65 Hanya 61 responden yang dikirim mengembalikan kuisisioner. Informasi tingkat pengembalian survei adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Distribusi Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Kuisisioner yang dibagikan	65	100
2	Kuisisioner yang tidak dapat diolah	4	6,2
3	Kuisisioner yang dapat diolah	61	93,8

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data tersebut di atas, hanya 61 dari 65 survei yang dikeluarkan yang dikembalikan atau 93,8%. Sedangkan 4 atau 6,2% kuisisioner tidak dapat diproses karena data responden tidak mencukupi atau memilih lebih dari dua pilihan. Enam puluh lima (65) kuisisioner disebar, dan 61 kuisisioner, atau 93,8%, dapat diproses.

Pengukuran Variabel

Variabel operasional penelitian memungkinkan untuk pengamatan berbagai pengukuran. Setiap pertanyaan dalam

penelitian ini akan memiliki skala Likert dengan 5 (lima) kategori jawaban, sebagai berikut:

Tabel 2
Kategori Jawaban Dan Skor

Kategori	Skor
SS = Sangat Setuju	5
S = Setuju	4
R = Ragu-Ragu	3
TS = Tidak Setuju	2
STS = Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiono (2015)

Adapun definisi operasional variabel untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Variabel Kompetensi Aparat Desa (X)	Knowledge/ Pengetahuan (Pertanyaan 1-4)	Likert
	Skill/ Keterampilan (Pertanyaan 5 - 10)	Likert
	Attitude/ Sikap (Pertanyaan 11-13)	Likert
Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Relevan (Pertanyaan 14 - 20)	Likert
	Andal (Pertanyaan 21 - 25)	
	Dapat Dibandingkan (Pertanyaan 26 - 28)	Likert
	Dapat Dipahami (Pertanyaan 29 - 30)	Likert

Sumber: Data diolah

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan kuisioner.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Kualitas Data

Pengujian Validitas Instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel.

Hasil pengujian Uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Hasil Pengujian Validitas (n=61, $\alpha = 5\%$, r tabel = 0,2126)

Variabel	Pertanyaan	r _{hitung}	r _{tabel}	Sign	Hasil
Kompetensi Aparat Desa (X)	P1	0,580	0,213	0,000	Valid
	P2	0,646		0,000	Valid
	P3	0,584		0,000	Valid
	P4	0,510		0,000	Valid
	P5	0,625		0,000	Valid
	P6	0,429		0,000	Valid
	P7	0,504		0,000	Valid
	P8	0,361		0,000	Valid
	P9	0,482		0,000	Valid
	P10	0,306		0,000	Valid
	P11	0,446		0,000	Valid
	P12	0,529		0,000	Valid
	P13	0,257		0,000	Valid

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	P14	0,358	0,213	0,000	Valid
	P15	0,296		0,000	Valid
	P16	0,294		0,000	Valid
	P17	0,528		0,000	Valid
	P18	0,468		0,000	Valid
	P19	0,577		0,000	Valid
	P20	0,569		0,000	Valid
	P21	0,588		0,000	Valid
	P22	0,688		0,000	Valid
	P23	0,474		0,000	Valid
	P24	0,431		0,000	Valid
	P25	0,384		0,000	Valid
	P26	0,713		0,000	Valid
	P27	0,384		0,000	Valid
	P28	0,559		0,000	Valid
	P29	0,389		0,000	Valid
	P30	0,547		0,000	Valid

Sumber : Data Diolah dengan Program SPSS)

Item pernyataan variabel X dan Y menerima nilai rhitung lebih dari atau sama dengan 0,3 dan tingkat signifikansi alpha (0,05) pada tabel di atas, yang menunjukkan bahwa semua item pernyataan dianggap asli.

Pengujian Reliabilitas Instrumen

Alat ukur yang menunjukkan keandalan menunjukkan konsistensi temuan pengukuran

ketika orang yang sama menggunakan alat tersebut beberapa kali. Pada setiap soal, uji reliabilitas dapat dijalankan secara bersamaan. Dikatakan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,6.

Tabel 5
Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen

Variabel	Koefisien Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi Aparat Desa (X)	0,722	<i>Reliable</i>
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,793	<i>Reliable</i>

Sumber : Data Diolah dengan Program SPSS

Seperti yang tercantum pada tabel di atas, semua variabel yaitu X dan Y memiliki nilai koefisien Cronbach alpha lebih dari 0,6 yang menunjukkan instrumen pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliable tujuannya agar responden memberikan jawaban yang sangat konsisten saat membuat pernyataan yang mewakili dimensi variabel X dan Y yang diurutkan dalam suatu kuesioner.

Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal.

Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov, yaitu:

1. Jika nilai sig > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal
2. Sebaliknya, jika nilai sig < 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

Tabel 6
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

a. Test distribution is Normal.		Unstandardized Residual	
N			61
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		6,61695813
Most Extreme Differences	Absolute		,082
	Positive		,082
	Negative		-,048
Test Statistic			,082
Asymp. Sig. (2-tailed)			,200 ^{c,d}

Sumber : Data Diolah dengan Program SPSS

Berdasarkan hasil pengujian tersebut di atas, nilai signifikan Asymp.Sig. (2-tailed) adalah 0,200, yang lebih besar dari 0,05. Dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal berdasarkan kriteria yang digunakan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov tersebut di atas. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi atau kondisi kenormalan model regresi telah terpenuhi.

Hasil Uji Regresi Linear Dasar

Regresi linier sederhana adalah regresi yang memiliki satu variabel dependen dan satu variabel independen. Tabel di bawah ini menunjukkan temuan analisis seperti yang tercantum dalam lampiran:

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	33,683	8,497		3,964	,000
	Kompetensi Aparat Desa	,640	,189	,404	3,396	,001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Sumber : Data Diolah dengan Program SPSS

Melihat hasil uji di atas di ketahui koefisien regresi untuk variabel independen menghasilkan nilai sebesar 0,408 yang bernilai positif. Jadi persamaan regresi linier sederhana maka akan menjadi sebagai berikut:

$$Y = a + bX, Y = 33,683 + 0,640X$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

a = Konstanta

b = Koefisien regresi variabel

X = Kompetensi Aparat Desa

Uji Hipotesis

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pengaruhnya signifikan atau tidak antara variabel bebas (X) terhadap variabel tak bebas (Y) secara parsial, maka peneliti akan menggunakan uji t dengan menggunakan alat bantu SPSS (statistical product and service solutions).

Berdasarkan signifikan dasar pengambilan keputusan adalah :

1. Jika sig dari $t < 0,05$ maka Haditerima dan Ho ditolak
2. Jika sig dari $t > 0,05$ maka H0 diterima dan Ha ditolak.

Tabel 8
Hasil Analisis Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	33,683	8,497		3,964	,000
Kompetensi Aparat Desa	,640	,189	,404	3,396	,001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Sumber : Data Diolah dengan Program SPSS

Hasil uji t di atas menunjukkan t hitung > t tabel ($3,396 > 1,671$), sig dari t sebesar $0,001 < 0,05$, ini berarti kompetensi Aparat Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan hipotesis diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian data menunjukkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini memenuhi persyaratan kualitas data yang tinggi, yaitu validitas dan reliabilitas.

Berdasarkan hasil uji statistik yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden dapat diketahui:

- a) Perangkat desa dalam pemerintahan desa di Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh kompetensi Aparat Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin diperoleh bahwa:

- a. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier sederhana diketahui koefisien regresi untuk variabel independen menghasilkan nilai sebesar 0,640, konstanta sebesar 33,683 hal ini menyatakan bahwa jika tidak ada kompetensi Aparat Desa atau bernilai nol (0), maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa nilainya 33,683. Sedangkan koefisien regresi sebesar 0,640 berarti bahwa setiap penambahan 1 skor kompetensi Aparat Desa akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,640.
- b. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan yaitu hasil perhitungan SPSS versi 23.0 menunjukkan bahwa signifikansi

Banyuasin memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan temuan uji statistik yang mencirikan situasi atau kondisi responden. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata Variabel Kompetensi Aparatur Desa yang tinggi yaitu 3,45 dan hasil wawancara langsung dengan Kepala Desa yang memiliki perangkat desa dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan bukan akuntansi.

- b) Kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Desa di Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin baik hal ini dilihat dengan nilai rata-rata dari kualitas laporan keuangan yang menunjukkan tinggi sebesar 3,67.

uji t $0,001 < 0,05$ dengan hasil thitung > tabel ($3,396 > 1,671$). Nilai ini menunjukkan kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin.

5. SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh kompetensi Aparat Desa terhadap kualitas laporan keuangan Desa di Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin diperoleh kesimpulan bahwa:

1. berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana diketahui koefisien regresi untuk variabel independen menghasilkan nilai sebesar 0,640.
2. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa signifikansi uji t $0,001 < 0,05$ dengan hasil thitung > tabel ($3,396 > 1,671$). Nilai ini menunjukkan

kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan (2019).
- Indrajaya, Johan Arif. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.(digilib.unila.ac.id, diakses 08 Januari 2019).
- Kendedes, Analisis Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin. (Politeknik Sekayu 2019)
- Kusumastuti (2014), Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Mahsun, M., Sulidtiyoti, F. dan Purwanugraha, H.A. (2016), Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: BPFE.
- Oktarina, Mia. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang. Jurnal Ilmu Akuntansi, Volume 2, Nomor 2. (<https://journal.uin-alauddin.ac.id>, 09 Januari 2019)
- Pandey, Juneidy. 2015. Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa. Jurnal Akuntansi Pemerintahan (JAP), Vol. 3 No.31. (<https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 08 Januari 2019)
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Upah Pasal 2 Ayat 6.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Struktur dan Skala Upah Pasal 6 Ayat 2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 48 Ayat 1.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Rakhmat. (2018), Administrasi Dan Akuntabilitas Publik, Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 10. (www.dpr.go.id, diakses 21 Februari 2019)
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 Ayat 1. (<https://jdih.kemenkeu.go.id>, diakses Februari 2019)
- Sanusi, Anwar. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat
- Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua). Yogyakarta: LPP STIM YKPN
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V Wiratna.2015. SPSS untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sujarweni, V Wiratna. 2012. Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian dengan
- Sulfiyah, Fifih. 2018. Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. (digilib.uinsby.ac.id, diakses 08 Januari 2019).
- Wijaya, David. 2018. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Gava Media
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.
- Klikberita.co.id, 10 April 2018.